

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fulthoni, R. A. (2009). *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama: Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan* (1st ed.). Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Munir. (2002). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim HS, & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zaenal Mukarom. (2019). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik: Menuju Clean Government and Good Governance*.

JURNAL DAN LAPORAN

Alselma Palna. (2021). *Akta Kematian sebagai Dasar Pembuktian Peristiwa Kematian*.

Fatih, & Putra. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu)*.

Nuraini, dkk. (2020). *Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dalam Penerbitan Akta Kematian di Wilayah Kota Jambi*. Wajah Hukum.

ARTIKEL INTERNET

Pemerintah Kota Jambi. (2025). *Peta Kota Jambi*. Diakses dari <https://jambikota.go.id/content/peta>

KPU Kota Jambi. (2025). *Profil Kota Jambi*. Diakses dari <https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/83/profil-kota-jambi> ([kota-jambi.kpu.go.id](https://kota-jambi.kpu.go.id/page/read/83/profil-kota-jambi) in Bing)

Localise SDGs Indonesia. (2025). *Profil Daerah Kota Jambi*. Diakses dari <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7> ([localisesdgs-indonesia.org](https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/7) in Bing)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Daerah.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi, UPTD serta Tata Kerja pada Disdukcapil Kota Jambi.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kematian melalui Aplikasi Whatsapp Online (PAKWO).